

**Analisa Evaluasi Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kecamatan  
Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara**

**Sarah Adelia Putri**

**Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan, Medan, Indonesia  
[sarahadeliaptr@gmail.com](mailto:sarahadeliaptr@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the Evaluation Analysis Of Social Assistance Funds (Bansos) in the Medan District, Madya City Area, North Sumatra Province. This study will focus on the formulation of the problem, namely How the Standard Operating Procedure (SOP) in the distribution of social assistance as an effort to reduce poverty in the Medan Area District and what are the inhibiting factors in the implementation of the distribution of Social Aid Funds and what are the criteria for the process and supervision of Social Aid Funds. The results showed that the positive impact of the policy of providing social assistance to the poor was to provide assistance in the form of basic necessities or money in order to ease the burden on the poor. While the negative impacts such as educating lazy life, prone to conflict, and educating consumptive life. As for the factors that influence the policy of providing social assistance such as budget or funds, coordination with certain fields, and community activities.*

**Keywords:** *Evaluation Analysis, Social Assistance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisa Evaluasi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Di Kecamatan Medan Area Kota Madya Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan berfokus pada rumusan masalah yaitu Bagaimana *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Medan Area dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Sosial serta Bagaimana kriteria proses dan pengawasan Dana Bantuan Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari kebijakan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat miskin adalah memberikan bantuan berupa sembako atau uang agar meringankan beban masyarakat miskin. Sedangkan dampak negatif seperti mendidik hidup malas, rentan konflik, dan mendidik hidup

konsumsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan pemberian bantuan sosial seperti anggaran atau dana, koordinasi dengan bidang-bidang tertentu, dan keaktifan masyarakat.

**Kata kunci : Analisa Evaluasi, Bantuan Sosial.**

**PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka dari itu diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia.

Kemiskinan termasuk masalah utama negara yang sedang membangun, termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan serius, dan kreatif. Permasalahan kemiskinan ini masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Pemerintah Sumatera Utara mempunyai tujuan untuk memberantas kemiskinan dengan cara melakukan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, dan menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara .

Menurut Kumayas (2022:1) Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah & masyarakat saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, dimana disetiap daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan secara drastis karena mengalami kesulitan keuangan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan dan pengemis yang hidup di jalanan serta sangat banyak juga orang tua yang mengemis membawa anak mereka yang masih berumur kurang dari 1 tahun, bertujuan untuk membuat orang lain merasa iba dan memberikan uang kepada mereka.

Maka dari itu, masih banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, salah satunya yakni akibat dari kurangnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah. Dalam hal ini seperti Menurut Badan Pusat Statistik (2016) bahwa kemiskinan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.

Menurut Hayat (2019:70) Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi pusat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat yang sangat perlu segera di atasi. Untuk menanggulangi kemiskinan ini pemerintah setempat harus memerhatikan warga mana yang layak mendapatkan bantuan, dan harus mendapat perhatian lebih karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mengakibatkan antara lain tingginya beban sosial ekonomi,

rendahnya produktivitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Dikutip dari Ainun (2020:2) Negara mempunyai tugas untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dasar yang menyebabkan kemiskinan sebagai tanggung jawab Negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Namun, meskipun adanya kriterianya tersebut, ternyata orang yang mendaftar melambung tinggi, karena banyak orang yang mendadak miskin pasca adanya Pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan adanya petugas pendata atau aparat desa yang sengaja memasukkan anggota keluarganya atau kerabatnya yang sebenarnya tidak miskin.

Menurut Hayat (2019:12) Pada kenyataannya, di lapangan Program Bantuan Sosial hanya sebagai program dadakan untuk mengejar target untuk meringankan gejolak sosial akibat adanya Pandemi Covid-19 ini. Hal ini dampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin. Mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga miskin sampai menyiapkan dan mengelompokkan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin, serta memberikan akses data untuk instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka adanya isu yang mencuat ke pada masyarakat adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program Bantuan Sosial.

Menurut Ibrahim (2020:97) Pandemi ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang mana nantinya ekonomi global akan melambat dan akan sangat mempengaruhi dunia perindustrian. Beberapa dampak yang merugikan bagi dunia industri diantaranya: Pertama, tekanan besar yang dialami oleh perusahaan manufaktur otomotif yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Kedua, sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, dan lain-lain yang juga mengalami kerugian dan tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya kebijakan *physical distancing*, PSBB dan lain sebagainya. Ketiga, industri perfilman, media, dan pers yang harus menunda syuting, penayangan film, pencarian menjadi terhambat dan berbagai sektor industri lainnya. Dampak-dampak di atas mengakibatkan banyak para pekerja yang terkena PHK, penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang mengalami kerugian bahkan banyak masyarakat yang harus menutup usahanya.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang

belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek *online*, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Pemerintah juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya, yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19, dan disalurkan dengan harapan dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Bagus (2020:6) Maka dari itu, tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan Dana Bansos tersebut adalah untuk meringankan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan.

Semenjak adanya Covid muncul di Indonesia sangat banyak para pekerja yang di PHK atau dipecat dan akan menambah jumlah masyarakat kurang mampu di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus agar meringankan masyarakat yang kurang mampu.

Dikutip dari *website* resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa: Pertama, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37.400.000.000.000,-. Kedua, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5.600.000,- orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000,- selama 4 bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000,- dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya.

Berikut Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

### **Gambar I Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020**

Menurut Ilman (2020:97) Adapun syarat utama dari penerima BST dan BLT-Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH dan Bansos Sembako. Penyaluran bantuan di Desa Gedongarum sudah berjalan selama 3 bulan, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Semenjak Covid-19, Indonesia diambang krisis ekonomi. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2019. Pemerintah pusat pun menyesuaikan skenario pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi 2,3% lebih rendah dari target APBN 2020 sebesar 5,3 %.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah kebawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program) baik dalam bentuk tunai maupun bahan pokok (Sembako). Untuk mencapai program bantuan sosial ini berjalan tetap sasaran, peran pemimpin terutama kepala desa sangat besar agar bantuan-bantuan tersebut sampai ditangan rakyat, karena kepala desa langsung berhadapan dengan rakyatnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Bantuan Pangan Non Tunai dalam implementasinya dilengkapi dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sebagai pedoman bagi petugas di lapangan. Selain sebagai pedoman bagi tugas untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), SOP ini juga selalu disosialisasi kepada KPM agar mengetahui prosedur dan mekanisme penyaluran sembako yang benar dan menangani dan bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan bantuan pangan non tunai relative efektif dan fleksibel sehingga memudahkan pengawasan dalam pelaksanaannya.

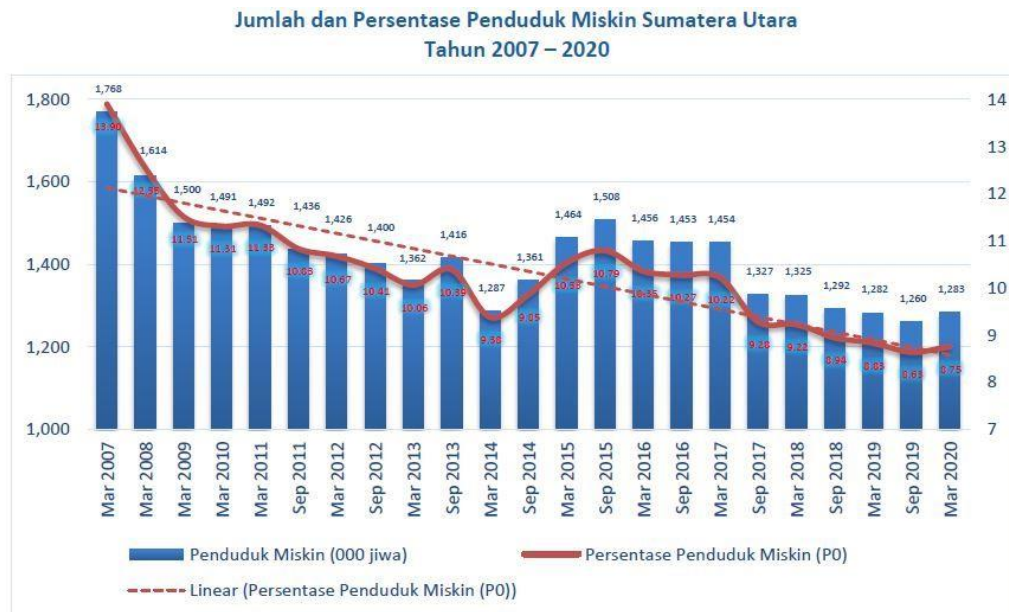
Lansia yang berumur di atas 70 tahun mendapatkan bantuan dana tunai sejumlah Rp.200.000,- per bulan (Kementerian Sosial RI, 2020). Pada tahun 2017, PKH dan bantuan sosial untuk lansia dalam Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) hanya diberikan kepada sekitar 150.000 orang dari 23.400.000 lansia (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Seperti kita ketahui dalam pendistribusian bantuan sosial sosial ini tidak terlepas dari masalah-masalah, yaitu dimana pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam arti, masih ada warga atau masyarakat yang seharusnya



menerima Bansos namun tidak menerima. Sebaliknya yang seharusnya tidak menerima seperti: masih bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan lain sebagainya menerima Bansos.

Berikut gambar angka kemiskinan di Kota Medan, Sumatera Utara



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2022

**Grafik II Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2007-2020**

Dengan adanya penjelasan di atas bahwa angka kemiskinan di Sumatera Utara tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui secara objektif dan nyata tentang pelaksanaan Bantuan Sosial di Kecamatan Medan Area.

Angka kemiskinan di Sumatra Utara pada 2020 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01 persen pada Maret 2020. Kemudian pada September 2020, jumlahnya menjadi 8,49 persen. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin.

Di bawah ini akan diuraikan Penerima Manfaat Bantuan Dana Sosial di Kecamatan Medan Area

**Tabel I  
Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Dana Sosial di Kecamatan Medan Area  
Pada Tahun 2019**

No	Besaran Anggaran	Jumlah Penerima
----	------------------	-----------------

1.	Rp.600.000 x 4 Bulan = 2.400.000	577 Penerima
Jumlah		Rp. 1.384.800.000

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Medan Area, 2019

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 ada 577 penerima Bantuan Dana Sosial yang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp.600.000 rupiah.

**Tabel II**  
**Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Dana Sosial di Kecamatan Medan Area Pada Tahun 2020**

No	Besaran Anggaran	Jumlah Penerima
1.	Rp.700.000 x 4 Bulan = 2.800.000	685 Penerima
Jumlah		Rp.1.912.400.0000

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Medan Area, 2020

Selanjutnya, dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020 pemerintah setempat menaikkan bantuan dana sosial, dan pada tahun 2020 yang menerima bantuan sosial pun juga meningkat, ada 683 penerima Bantuan Dana Sosial yang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp.700.000 rupiah.

Di bawah ini akan diuraikan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Miskin di Kecamatan Medan Area pada Tahun 2019

**Tabel III**  
**Jumlah Kartu Keluarga (KK) Miskin di Kecamatan Medan Area Pada Tahun 2019**

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Kotamatsum I	150
2.	Kotamatsum II	120
3.	Kotamatsum IV	190
4.	Tegal Sari I	200
5.	Tegal Sari II	195
6.	Tegal Sari III	250
7.	Pandau Hulu II	243
8.	Sei Rengas II	187
9.	Sei Rengas Permata	300
10.	Pasar Merah Timur	254
11.	Sukaramai I	159
12.	Sukaramai II	120
<b>Total</b>		<b>2.368</b>

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Medan Area, 2019

Di bawah ini akan diuraikan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Miskin di Kecamatan Medan Area pada Tahun 2020

**Tabel IV**  
**Jumlah Kartu Keluarga (KK) Miskin di Kecamatan Medan**

## Area Pada Tahun 2020

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Kotamatsum I	150
2.	Kotamatsum II	178
3.	Kotamatsum IV	156
4.	Tegal Sari I	223
5.	Tegal Sari II	256
6.	Tegal Sari III	200
7.	Pandau Hulu II	254
8.	Sei Rengas II	265
9.	Sei Rengas Permata	231
10.	Pasar Merah Timur	233
11.	Sukaramai I	167
12.	Sukaramai II	145
<b>Total</b>		<b>2.458</b>

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Medan Area, 2020

Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019-2020 penduduk miskin yang ada di Kecamatan Medan Area mengalami peningkatan. Di Tahun 2019 jumlah penduduk miskin ada 24 % ( $577/2.368 = 0.24 \times 100\% = 0.24\%$ ), sedangkan di Tahun 2020 ada 27% ( $683/2.458 = 0.27 \times 100\% = 0.27\%$ ). Tahun 2019 ke 2020 penduduk miskin yang ada di Kecamatan Medan Area mengalami kenaikan sebesar 3% .

### METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari informan, Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui berapa dana bantuan sosial yang diterima masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Medan Area. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Medan Area yang berlokasi di Jalan Rahmadsyah No. 2 Medan. Sumber primer adalah sumber yang dicatat langsung oleh peneliti melalui hasil wawancara mengenai masalah-masalah menyangkut Bantuan Dana Sosial yang diterima masyarakat di Kecamatan Medan Area, Untuk memperoleh data yang benar atau valid dan akurat, peneliti menggunakan empat (4) teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan

Dalam Penelitian ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan, baik data primer maupun data sekunder dengan tujuan agar penelitian ini mudah dibaca, dipahami. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu :

- Mengumpulkan data-data (data KK Miskin 2019-2020, Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Area, Penerima Manfaat Bantuan Sosial 2019-2020) atau dokumen yang terkait dengan data Bantuan Sosial.
- Membandingkan jumlah data yang merupakan penerimaan manfaat bantuan sosial dari tahun 2019-2020.
- Membuat dan menyebarkan pertanyaan atau kuesioner dalam bentuk wawancara kepada narasumber yang terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kecamatan Medan Area.



- d. Langkah terakhir yaitu memberikan suatu kesimpulan dari apa yang sudah diteliti dan memberikan saran-saran yang positif serta bersifat membangun.

## **HASIL PENELITIAN**

Peneliti akan meneliti hanya di Kecamatan Medan Area, dimana program Bantuan Sosial tersebut diberikan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Tujuan diberikannya bantuan ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu menutupi kebutuhan pokok.

Program bantuan ini adalah berupa uang tunai atau sembako yang diberikan kepada masyarakat setempat yang sesuai kriteria senilai Rp.600.000,- perbulan dari tahun 2019 sampai 2022 hingga saat ini. Untuk memperoleh bantuan ini, masyarakat juga harus melalui proses verifikasi dan validasi data. Proses ini dapat dikatakan bersifat nasional, karena harus melalui pihak Kepala Lingkungan sampai dengan penetapan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial sehingga berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak selalu semua usulan valid masuk ke dalam DTKS.

Jumlah penerima manfaat yang terdampak faktor ekonomi diakibatkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Medan. Lapangan pekerjaan yang terdapat di Kota Medan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada, dimana lapangan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Maka dari itu, dibutuhkan upaya dan peran pemerintah setempat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga munculah program Bantuan Sosial tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan ini diadakan ketika terjadi krisis ekonomi dimasyarakat yang kurang mampu, hal ini sesuai dengan diterbitkannya keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu: “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial”.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial pun berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program Bantuan Sosial dengan memberikan sejumlah uang atau sembako yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menjaga daya beli.

### **Analisis Hasil Mengenai Faktor Ekonomi yang Melanda Warga Kecamatan Medan Area.**

Hasil informasi yang diperoleh peneliti salah satu faktor penyebab kemiskinan yang ada di Kecamatan Medan Area adalah lemahnya semangat kerja di lingkungan masyarakat, kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli serta BBM yang naik membuat harga kebutuhan juga melambung naik, membuat kondisi semakin parah yang mengakibatkan kemiskinan yang berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber yakni Penerima Manfaat yang ada di Kecamatan Medan Area banyak kalangan masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok dikarenakan adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini diakibatkan karena banyak dari masyarakat yang

mengalami penurunan jam kerja karena faktor usia, serta terjadinya pemutusan hubungan kerja karena adanya Wabah Covid-19.

a. Jangka Waktu

Jangka waktu yang dimaksud adalah pelaksanaan program bantuan ini yang telah berjalan 2 gelombang, apakah sudah dapat dikatakan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau belum. Uang bantuan ini digunakan oleh mereka seperti untuk penambahan modal serta membeli kebutuhan pokok. Namun mereka mengatakan, uang bantuan ini tidak bias memenuhi kebutuhan mereka selama sebulan penuh.

b. Pencapaian Tujuan (Waktu dan Sasaran)

Tujuan pencapaian yaitu seluruh upaya dari pencapaian harus dipandang sebagai proses. Faktor dari tujuan tersebut adalah jangka waktu dan sasaran dari sebuah program.

### **Peran Pemerintah dalam Mengatasi Faktor Ekonomi di Kecamatan Medan Area.**

Kesejahteraan sosial merupakan aspek yang penting bagi setiap manusia untuk bertahan hidup, pada UU NO.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Medan Area menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli beras, gula, dan minyak makan. Oleh karena itu, pemerintah membantu masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai data penerima bantuan, masyarakat di Kecamatan Medan Area sudah menerima berbagai bantuan baik tunai berupa uang Rp.600.000,- perbulannya, maupun non tunai berupa beras, gula, dan minyak makan diberikan melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria yang ada di Kecamatan Medan Area seperti ibu hamil sampai menuju kelahiran, anak usia dini dari umur 0-6 tahun, anak usia sekolah SD dari umur 6 tahun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak sekolah SMP yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Anak sekolah SMA yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), lanjut usia (lansia) dari umur 60 tahun, penyandang disabilitas seperti disabilitas wicara, rungu, dan netra.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil dari pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Cara menangani kemiskinan dengan 2 cara, yaitu:
  - a. Melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara.
  - b. Membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran dana Bansos:

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran. Permasalahan pertama adalah data penerima bantuan sosial tidak akurat. Ketidakkuratan data selalu

menjadi permasalahan klasik di setiap penyaluran bantuan sosial. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab ketidakakuratan data, yaitu belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk 14 15 Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi dan validasi data juga masih lemah dan lambat.

3. Kriteria penerima Bansos:
  - a. Ibu hamil sampai menuju kelahiran.
  - b. Anak usia dini dari umur 0-6 tahun.
  - c. Anak usia sekolah SD dari umur 6 tahun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  - d. Anak sekolah SMP yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  - e. Anak sekolah SMA yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  - f. Lanjut Usia (Lansia) dari umur 60 tahun.
  - g. Penyandang disabilitas seperti disabilitas wicara, runtu, dan netra.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran, kiranya bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Bansos agar berdampak lebih baik di Kecamatan Medan Area, yaitu sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya sebelum meloloskan calon penerima manfaat Bansos memeriksa data-data agar akurat.
2. Kriteria penerima manfaat Bansos harus lebih diperhatikan agar sampai ke masyarakat yang layak menerimanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M., Nefianthi, R., Yasrie, A., & Wahab, A. (2020). Berbagi Berbagi/Memberikan Bantuan Dimasa Pandemi Corona Kepada Masyarakat Yang DiperkirakanTerdampak Covid-19 Di Desa Anjir Seberang Pasar 2 Kabupaten Batola. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol.1, No.3, Hal: 375-383, ISSN: 2252-6765.
- Apriyani, r., vernanda, p. H., & Firman, s. (2020) Kesimpangsiuran Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Ditengah Pandemi Covid-19, ISSN: 2580-3875.
- Arikunto, Suharsimi, (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Umbulharjo 2012: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Bagus, (2020), Dana Bansos Untuk Meringankan Kebutuhan Dasar Yang Terdampak Dari Adanya Pandemi Covid-19, ISSN: 2677-5996.
- Cambara, c., & Izzatusholekha, i. (2021, october). Program bantuan sosial tunai (bst) dalam menghadapi pandemi covid-19 di Kelurahan Gandaria Utara Rw 02.In *prosiding seminar nasional pengabdian masyarakat tlppmumj* (vol. 1, no. 1), ISSN: 2721-3870.

- Dunn, William N. (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elisa, E., Tukino, T., & Syastra, M. T. (2022, January). Analisa Pemetaan Penerimaan Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dengan Algoritma Clustering. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (No. 4, pp. 301-306), ISSN: 2764-2665.
- Filsa, a. (2019). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram), ISSN: 2990-6654.
- Galvin, G., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengawasan, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Kompetensi Aparatur, Sarana Prasarana Dan Efektivitas Bantuan Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Di Kota Surakarta. *INOVASI*, 17(3), 410-416, ISSN: 2091-2433.
- Handayani, S. (2022). Bantuan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia Di Masa Pandemi. *Journal of Sosial Development Studies*, 1(2), 61-75, ISSN: 2714-6286.
- Hayat. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamansari 60 Kecamatan Ampel gading Kabupaten Malang). *Jurnal* Vol.13, No 6, Tahun 2019, (Hal70-76)
- Ibrahim, Abdul Malik. (2020, 30 Juni). “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia” dalam <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-DampakCovid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia>, ISSN: 2305-2060.
- Ilman, Enrico, (2020), Pandemi Covid- 19: Dampak Sosial-Ekonomi, Tantangan, Dan Potensi Solusi (Sudut Pandang Sosiologis), ISSN: 2634-2047.
- Jayid, T.A., Putra, K.y., Sartika, T. D. L., & Utari, S. A. (2021, Oktober). Implementasi Program Bantuan Sosial Sembako Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kampung Kebon, Kelurahan Cinangka, Sawangan, Depok.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2010. Geografi Indonesia. [www.indonesia.go.id/](http://www.indonesia.go.id/) diakses tgl 10 November 2014.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020) menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- Kontjaraningrat, (2002). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajianStrategis*, ISSN: 2531-2001.
- Kumayas (2022), *Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19*, Vol.3, No. 2 (Agustus 2020) *Jurnal Dinamika Pemerintahan Ainun* ,(2020), *Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi*, ISSN: 2304-2069.
- Kusudur, Ainun, (2020) *Evaluasi Program Bantuan Beras miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-VOUCHER di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, volume 8, No 1
- Kusumaputra, A. (2021, September). *Simplifikasi Birokrasi Penyaluran Bantuan Sosial dalam Situasi Darurat Pandemi Covid-19 melalui Transformasi Legal-Digital*. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 1, No. 1) ISSN: 2599-2498.
- Morado, r. (2021).*Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dki Jakarta*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122-137, ISSN: 2460-0585.
- Nasrullah, M. A., & Annisa, R. (2021).*Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 4(2), 95-101 ISSN: 2714-6286.
- Noerkaisar, N. (2019). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104 ISSN: 2528-1097.
- Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A (2020) *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97-110 ISSN: 2685-3582.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07 / 2020, ISSN: 2458-3611.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)*.
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 6 Nomor 27 (2005) tentang *Pemerintahan Desa Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat*.

- Pradani, R. F. E., Zainuri, A., Rosid, H. A., Roihan, M., & Anam, A. K. (2021). Sosialisasi dan Edukasi Literasi Keuangan pada Masyarakat Penerima Dana Bantuan Sosial Langsung Tunai (BST) dalam Penangan Dampak Covid-19. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 2(2), 54-61, ISSN: 2087-0469.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial&Humaniora*, 1(12), 113-120 ISSN: 2686-5661.
- Putri, E. A., & Hayat, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batu licin Kabupaten Tanah Bumbu). *Respon Publik*, 15(7), 32-38, ISSN: 2784-4152.
- Putri, E. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi COVID-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batu licin Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), ISSN: 2367-5478.
- Rencana Strategis Kecamatan Medan Area Tahun 2021-2026.
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789-804, ISSN: 2087-3421.
- Sugiyono. (2010). Purposive Sampling, dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Thalib, P., Wisudanto, W., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100-108, ISSN: 2746-0387.
- Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (2018) 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI; 2017. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 Tentang Keadilan dan Kemakmuran Rakyat.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Wowiling, R. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 11(1) ISSN: 2721-4095.